

ABSTRAC
**Factor that Regard To Increase Labour Income sectorallies Informal at
Kerinci's Base Pelelawan's Regency**

Yulina
yulinayulina@yahoo.co.id

Under Guidance: Drs. H. Syafril Basri, M.Si and Drs. H. Hendro Ekwarso, M.Si

To the effect this research is subject to be know factors any kind that regard to increase female labour income informal sector at Base kerinci Pelelawan's Regency. Population on pebelitian this is all woman that works at informal sector one is at kerinci's Base City Pelalawan's Regency total 646 person, determination foots up sample be done by use of formula Slovin and gotten by sample as much 87 person, sample's take is done with Proportional Stratified Random Samplingi.

This observational result concludes that effort location to informal labouring income, found that informal effort that gets location at urban, having probabilita greatering to get income with or greater from UMP than informal labour that gets location at rural. As subjective as thereto labouring well-being step-up programs informal have to reach them those are on rural. Man hour bases to test logistics, giving influence largesting to informal labouring income. From analisis descriptive found a large part labour works in big man hour, but at other side a large part their income lies under UMP. That fact betoken its low informal labouring productivity. Base this finding and point finding 3, therefore skill training constitute to program that have in order to been done labouring well-being step-up informal. Logistics examination also proves that amount capitaling to have positive relationship with propertied labouring informal. As subjective as thereto programs for increasing informal employ access to about capital has continually be carried on.

Key word: Informal Sector, Labour, Income

A. PENDAHULUAN

Sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku informal, antara lain kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjaanya terutama berasal dari tenaga keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah. Sedangkan menurut BPS, pekerja sektor informal adalah mereka yang status pekerjaannya adalah ; pertama, berusaha sendiri. Kedua, berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga / buruh tidak tetap. Ketiga, pekerja tidak tetap / pekerja keluarga.

Ketenagakerjaan di Riau khususnya Kabupaten Pelalawan tidak berbeda jauh dari kondisi Indonesia pada umumnya. Sebagian besar angkatan kerja bekerja pada sektor informal. Pada tahun 2005, 71,05 persen pekerja, bekerja di sektor informal. Dari jumlah tersebut, pekerja informal dengan status pekerjaan berusaha sendiri menduduki persentase terbesar, yaitu 23,67 persen dari seluruh pekerja. Pada tahun-tahun sesudah krisis, proporsi pekerja yang berusaha sendiri menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan proporsi diatas 20 persen dari seluruh pekerja di Pelalawan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, dimana peranan sektor informal sangat besar, sudah waktunya angka pengangguran tidak lagi sebagai indikator untuk melihat dinamika pasar tenaga kerja. Diperlukan sebuah pemahaman baru terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia, bahwa masalahnya bukanlah orang bekerja atau tidak bekerja, melainkan kesejahteraan pekerja yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang mereka peroleh (Priyono, 2002). Ini sejalan dengan kesimpulan dari survey ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Gavin Jones dan Bondan Supratilah pada tahun 1975 di Palembang dan Ujung Pandang bahwa masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian bukan kesempatan kerja semata, melainkan kesempatan kerja yang sekurang-kurangnya dapat memberikan suatu standar hidup minimum yang memadai. Penghasilan tenaga kerja informal bukan berupa upah yang diterima tetap setiap bulannya, seperti halnya tenaga kerja formal. Upah pada sektor formal diintervensi pemerintah melalui peraturan Upah Minimum Propinsi (UMP). Tetapi penghasilan pekerja informal lepas dari campur tangan pemerintah.

Dewasa ini perempuan mempunyai hak untuk memutuskan apa yang hendak dilakukan dalam hidupnya, apakah dia mau berkarir, menjadi ibu rumah tangga saja dan lain-lain karena perempuan di Indonesia telah memperoleh hak, kewajiban, tugas pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Persamaan-persamaan atau kesetaraan tersebut meliputi persamaan kesempatan, hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab yang sejalan dengan kodrat kemanusiaanya (sebagai perempuan) baik sebagai warga masyarakat maupun warga Negara Indonesia (Munandar, 1985).

Peran perempuan di Riau tergolong cukup baik dengan indeks pengembangan perempuan mencapai 61,0 (diatas rata-rata nasional 55,9) dan menduduki peringkat ke-4 nasional (setelah Yogyakarta, Jakarta, dan Sumatera Utara). Dalam hal Indeks Pemberdayaan Perempuan, Riau mempunyai nilai 52,7 (di atas rata-rata nasional 49,5) dan menduduki peringkat ke-5 (setelah Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur). Berbeda dengan indeks tingkat provinsi, indeks pengembangan perempuan di Pelalawan adalah sebesar 60,9 atau peringkat ke-51 dari 249 Kabupaten/Kota di Indonesia sedangkan indeks pemberdayaan perempuan mencapai 46,8 peringkat ke-126 (Hann, 2004). Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, umumnya perempuan di Riau dan Pelalawan khususnya sudah mampu mengembangkan dirinya. Sehingga perlu dikaji bagaimana sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarganya.

Peran perempuan dalam bidang domestik maupun publik di berbagai daerah sudah banyak diketahui, tetapi peran perempuan di sector informal di Pelalawan dalam menyumbang pendapatan keluarga belum banyak diteliti. Sektor

informal merupakan alternative lain dari para perempuan yang tidak mendapat kesempatan untuk beraktivitas di sektor formal. Namun demikian peran perempuan sector informal dalam membantu perekonomian rumah tangga tetapi belum diketahui berapa besar kontribusinya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat pendapatan mereka. Oleh karena itu penelitian mengenai peran dan faktor-faktor penentu pendapatan perempuan di sector informal menjadi penting dilakukan.

Pada satu sisi keberadaan perempuan di sector informal yang di Pelalawan menunjukkan bahwa kesetaraan peran perempuan dan laki-laki (gender) telah lama dipraktekkan, tetapi kenyataannya belum banyak data yang diketahui berapa besar kontribusi mereka terhadap pendapatan keluarga serta belum banyak kajian mengenai faktor-faktor apa yang menentukan tingkat pendapatan perempuan di sector informal. Berdasarkan uraian di atas maka telah dilakukan penelitian untuk mengetahui peranan dan kontribusi perempuan sector informal dalam peningkatan pendapatan keluarga serta mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perempuan di sector informal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sector informal merupakan bidang yang banyak ditemukan. Namun mengetahui sampai sejauh mana tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan pekerjaan di sektor informal, perlu di teliti. Menurut Standing (2010), untuk mengukur tingkat pemanfaatan angkatan kerja, salah satunya faktor yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara tingkat pendidikan seseorang dengan lapangan pekerjaan yang ditekuninya. Jika tingkat pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan maka akan menimbulkan tingkat *under employment*.

Under employment yaitu orang yang bekerja di bawah kemampuan yang dimilikinya, dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas dan pendapatan. Kondisi ini muncul karena semakin konfliknya penciptaan lapangan pekerjaan di kota-kota apalah kota-kota yang baru berkembang seperti Kabupaten Pelalawan, khususnya Kota Pangkalan Kerinci.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah pemekaran di Propinsi Riau. Sebagai daerah yang baru berkembang, maka sangat banyak bermunculan unit-unit usaha sector informal. Secara lebih lengkap perkembangan sector informal di Kabupaten Pelalawan khususnya di kota Pangkalan kerinci dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1: Perkembangan Jumlah Sektor Informal di Kota Pangkalan Kerinci, Tahun 2004-2011

No	Tahun	Unit Usaha	Perkembangan
1	2004	820	-
2	2005	983	19.88
3	2006	1.086	10.48
4	2007	1.128	3.87
5	2008	1.297	14.92
6	2009	1.387	6.93
7	2010	1.564	12.76
8	2011	1.727	10.42
Rata-Rata		1.249	9.91

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir, pertumbuhan jumlah unit usaha sektor informal semakin signifikan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 9.91% atau dalam satu tahun muncul unit usaha baru sebanyak 1.249 unit. Perkembangan yang sangat pesat ini tentunya juga akan memberikan kesempatan pada penyerapan tenaga kerja yang juga akan semakin tinggi. Pertumbuhan sektor informal ini akan seiring dengan pertumbuhan penduduk daerah perkotaan yang semakin laju, sehingga menyebabkan tanah, perumahan, fasilitas lainnya semakin mahal.

Selanjutnya sebagai daerah yang baru beru berkembang, maka jumlah penduduk juga akan semakin cepat pertumbuhannya, karena adanya anggapan atau persepsi dari masyarakat, bahwa daerah baru berkembang akan memberikan peluang usaha yang menjanjikan sehingga akan mendorong masyarakat yang berada di daerah pedesaan untuk pindah ke kota dan begitu juga dengan penduduk daerah-daerah lainnya. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pelalawan, berikut dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan selama 8 tahun terakhir.

Tabel 2 : Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2004-2011.

No	Tahun	Penduduk (Orang)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2004	56.510	45.217	101.727
2	2005	63.351	48.321	111.672
3	2006	65.272	52.321	117.593
4	2007	69.256	56.267	125.523
5	2008	70.605	58.360	128.965
6	2009	76.361	60.257	136.618
7	2010	79.061	67.205	146.266
8	2011	80.251	68.265	148.516

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan

Dari Tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Pelalawan dari tahun ketahun mengalami peningkatan walaupun tidak dalam skala besar dan disini terlihat jelas bahwa penduduk Kabupaten Pelalawan yang berjenis kelamin perempuan dari data tahun terakhir adalah sebanyak 68.265 jiwa. Perkembangan penduduk yang sangat pesat ini akan menimbulkan semakin cepatnya pertumbuhan sektor informal di Kabupaten Pelalawan.

Polemik tentang prospek sektor informal yang terus berlangsung disertai pesatnya penambahan jumlah tenaga kerja yang masuk ke sektor tersebut, mengindikasikan perlunya suatu studi yang secara mendalam menelaah perkembangan, prospek dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor informal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Tenaga Kerja Perempuan Sektor Informal di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.**

Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja perempuan sektor informal di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja perempuan sektor informal di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh setelah dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pemahaman tentang karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja perempuan sektor informal di Kabupaten Pelalawan.
2. Mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja perempuan sektor informal di Kabupaten Pelalawan
3. Bagi para pekerja terutama tenaga kerja perempuan sektor informal di Kabupaten Pelalawan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan agar para pekerja perempuan di sektor informal dapat meningkatkan pendapatan mereka.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat meneliti masalah ini lebih jauh dimasa yang akan datang.

B. METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk penyelesaian penelitian ini, terutama dalam memperoleh data yang di perlukan, penulis dalam hal ini berusaha untuk mendapatkan data yang akurat langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kota Pakangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan pada awal bulan September 2012 sampai akhir bulan Desember 2012.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wanita yang bekerja di sector informal yang ada di Kota Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan berjumlah 646 orang. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dalam Husien Umar (2000: 36) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1} = n = \frac{646}{646(0,1)^2 + 1} = 86.59 \approx 87 \text{ Orang}$$

Dimana : N = Jumlah populasi

d = tingkat keyakinan yang digunakan 10 %

Dengan demikian jumlah sample yang akan digunakan adalah 87 orang. Selanjutnya pengambilan sample dilakukan dengan *Proportional Stratified*

Random Sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan cara mengelompokkan atau membagi populasi berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini pembagian populasi didasarkan atas jenis usaha yang ditekuninya, dengan demikian maka jumlah sampel untuk setiap kelompok adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Jumlah Sampel Berdasarkan Kelompok Usaha

Jenis Barang Dagangan	Populasi	Sampel
Pedagang	545	$(545/646) \times 87 = 73$
Home Industri	101	$(101/646) \times 87 = 14$
Jumlah	646	87

Sumber : Data Olahan, 2013

Jenis dan Sumbe Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau data yang belum dipublikasikan oleh pihak lain. Dan data sekunder yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain seperti data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, dan data dari instansi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden, dalam hal ini wanita pedagang kaki lima di pasar tradisional Kabupaten Kampar.
2. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuisisioner yang sudah dipersiapkan kepada responden.
3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengandakan data atau mengcopy data yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait, seperti data tentang jumlah penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah :

1. Variabel *Dependen (terikat)* yaitu : Pendapatan perempuan sektor informal adalah: Kontribusi sukarela perempuan dalam menunjang pendapatan keluarga dalam aktivitas ekonomi sektor informal.
2. Variabel *Independen (variabel bebas)* , terdiri dari :
 - a. Umur adalah umur responden saat diwawancarai (tahun).
 - b. Pendidikan adalah: jenjang pendidikan formal tertinggi yang pernah diikuti oleh responden. Dalam hal ini pendidikan diukur dengan lamanya responden dalam mengikuti pendidikan, jika responden tamat (SD) Sekolah Dasar sampai dengan (SMU) Sekolah Menengah Umum (nilainya 1) dan jika responden tidak tamat (SD) Sekolah Dasar sampai (SMU) Sekolah Menengah Umum. (nilainya 0).
 - c. Pengalaman Kerja. merupakan lamanya seseorang menekuni pekerjaannya
 - d. Curahan kerja adalah kontribusi sukarela wanita melakukan aktifitas berjualan di sektor informal yang di hitung dalam satuan (jam)
 - e. Modal Operasional merupakan besarnya modal yang digunakan

dalam aktivitas atau usaha yang dijalaninya.

Uji Asumsi Klasik

Menurut Santoso (2003) mengatakan bahwa model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias yang baik jika memenuhi asumsi klasik yaitu bebas autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas serta pola distribusi data harus normal. Jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang digunakan menjadi tidak efisien. Ada tiga asumsi yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Multikolinearitas

Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah variabel independen yang ada memang benar-benar mempunyai hubungan yang erat dengan dengan variabel dependen. Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada hubungan yang sempurna antara variabel independen. Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel independen. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar, dan probabilitas menerima hipotesis yang salah juga semakin besar. Sehingga model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir nilai variabel independen. Model regresi bebas multikolinearitas apabila (Santoso, 2000):

- a. Mempunyai nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sekitar angka 1
- b. Mempunyai angka *Tolerance* mendekati 1

2. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi variabel independen yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heterokedastisitas.

3. Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Karena model yang baik data harus mengikuti pola distribusi normal. Pendapat ahli statistik menyatakan jika jumlah sampel sama atau lebih dari 30 maka diasumsikan data sudah mengikuti pola distribusi normal. Namun dalam penelitian ini tetap dilakukan uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji *one-sample kolmogorove smirnov* dan *Normal P-Plot Regression*.

Metode Analisa Data

Untuk melakukan analisa estimasi terhadap Partisipasi Wanita di sektor Informal sebagai dependent variabel, dengan melihat sejauh mana pengaruh variabel independent mempengaruhinya, digunakan regresi linier berganda dalam bentuk :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Dimana:

Y	= Pendapatan perempuan sektor informal
X ₁	= Usia responden
X ₂	= Pendidikan
X ₃	= Pengalaman kerja
X ₄	= Curahan Kerja
X ₅	= Modal Operasi

a = Konstanta
b₁, sampai b₅ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel.

Sebelum model regresi berganda diatas digunakan untuk menarik kesimpulan, maka harus diuji terlebih dahulu dengan prosedur pengujian sebagai berikut :

Uji-t

Pengujian ini digunakan untuk menguji signifikan suatu parameter secara individu. Dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho : $\pi_i = 0$, berarti tidak ada pengaruh variabel bebas ke-i terhadap variabel tidak bebasnya.

Hi : $\pi_i \neq 0$, berarti ada pengaruh variabel bebas ke-i terhadap variabel tidak bebasnya.

Rumus: (Gitiarati, 2000)

dimana: $t = \frac{\hat{b}_i}{Se_{\hat{b}_i}}$

Dimana : \hat{b}_i = Koefisien Regresi
Se = Standar Error

Kriteria :

Dengan taraf signifikansi sebesar 0.05 dan derajat kebebasan sebesar n-k, maka diperoleh t-tabel. Adapun kriteria untuk menerima dan menolak H₀ adalah:

- a. Jika t-tabel < t-hitung, maka hipotesa nol diterima dan hipotesa alternative ditolak.
- b. Jika t-hitung \geq t-tabel, maka hipotesa nol ditolak dan hipotesa alternatif diterima

Selanjutnya untuk pengolahan data dari hasil kuisisioner penulis menggunakan program *statistical product and service solution*, yang lebih dikenal dengan program SPSS, dimana dari program ini akan menghasilkan output, berupa koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R²), t hitung dan F hitung serta persamaan regresi, yang semuanya merupakan hasil dari penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif Tenaga Kerja Informal di Pelalawan Jumlah dan Lokasi Usaha Tenaga Kerja Informal

Dari pengolahan data Survey Usaha Terintegrasi (SUSI) tahun 2004, didapatkan jumlah usaha informal yang dikelola sendiri tanpa bantuan pekerja dan usaha yang dikelola dengan bantuan anggota keluarga atau pekerja tidak dibayar sebanyak 273.374 usaha. Artinya sejumlah yang sama, atau 273.374 orang tenaga kerja di Pelalawan berstatus sebagai pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja yang berusaha dibantu anggota keluarga/pekerja tidak dibayar. Dengan membandingkan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang berlaku di

Pelalawan pada tahun 2004 Rp 240.000,-), berdasarkan lokasi usaha tenaga kerja informal dapat dikelompokkan seperti terlihat pada Tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 4. Lokasi Usaha dan Pendapatan Tenaga Kerja Informal

Kategori Pendapatan	Lokasi Usaha				Total	
	Perkotaan		Pedesaan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sama / besar dari UMP	25.461	36,21	66.655	32,82	92.116	33,70
Kecil dari UMP	44.851	63,79	136.407	67,18	181.258	66,30
Total	70.312	25,72	203.062	74,28	273.374	100

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan

Dari tabel 5.1 diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar (74,28 %) lokasi usaha tenaga kerja informal berada di daerah pedesaan. Walaupun Survey Usaha Terintegrasi (SUSI) tidak memasukkan sektor pertanian, yang dominan digeluti oleh penduduk pedesaan Pelalawan, namun dari data yang ada terlihat jumlah pekerja yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu anggota keluarga masih lebih banyak di pedesaan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk berdomisili di pedesaan. Dilihat dari pendapatan tenaga kerja perempuan informal, ternyata hanya sepertiga (33,70%) dari pekerja informal yang berpendapatan sama atau lebih besar dari UMP yang berlaku di Pelalawan pada tahun 2012. Itu artinya pendapatan yang mereka peroleh hanya sekedar untuk bertahan hidup. Dari lokasi usaha, persentase pekerja informal yang berpendapatan sama atau lebih besar dari UMP ternyata lebih besar di perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan.

Lapangan Usaha Tenaga Kerja Informal

Penelitian Tim LP3ES pada tahun 1992 di Jakarta dan Surabaya, menyimpulkan bahwa pendapatan tenaga kerja informal dipengaruhi oleh jenis atau bidang pekerjaan. Untuk kondisi Pelalawan, jenis lapangan usaha yang digeluti oleh tenaga kerja informal dan persentase tenaga kerja yang berpenghasilan diatas dan dibawah UMP dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5 : Lapangan Usaha dan Pendapatan Tenaga Kerja Informal

Kategori Pendapatan	LAPANGAN USAHA								Total
	Ptambgn (jml & %)	Industri (jml & %)	Listrik (jml , %)	Knstrksi (jml & %)	Dagang (jml & %)	Angktn (jml , %)	Lbg keu (jml , %)	Jasa (jml , %)	
Besar sama UMP	705 75,1	14.535 42,27	--	1.734 81,99	45.163 25,00	16.518 59,65	2.600 38,13	10.861 52,49	92.116 33,7
Kecil dari UMP	234 24,9	19.854 57,73	118 100	381 18,01	135.451 75,00	11.173 40,35	4.218 61,87	9.829 47,51	181.258 66,30
TOTAL	939 0.34%	34.389 12,58%	118 0,04%	2.115 0,77%	180.614 66,07%	27.691 10,13%	6.818 2,50%	20.690 7,574	273.374 100 %

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan

Meskipun lapangan usaha perdagangan merupakan lapangan usaha yang paling dominan, dimana dua pertiga (66,07 %) tenaga kerja informal bergerak di sektor ini, namun ternyata sektor perdagangan memberikan pendapatan di bawah UMP dengan persentase terbesar setelah lapangan usaha listrik. Tiga per empat dari tenaga kerja informal yang bergerak dibidang perdagangan berpendapatan di bawah Rp 1.150.000,- per bulan (UMP Pelalawan tahun 2012). Dengan demikian

daya tarik sektor ini bukanlah dari *return* yang diterima, tetapi karena sektor perdagangan relatif mudah dimasuki dan tidak membutuhkan keterampilan tertentu.

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat, lapangan usaha yang relatif membutuhkan keterampilan seperti konstruksi, jasa dan transportasi, persentase pendapatan diatas UMP lebih besar daripada pendapatan di bawah UMP. Ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah karena selama ini program-program pelatihan untuk peningkatan produktifitas tenaga kerja cenderung ditujukan untuk tenaga kerja formal, sementara tenaga kerja informal sering terabaikan. Pelatihan-pelatihan keterampilan mutlak diperlukan agar tenaga kerja informal mempunyai bekal untuk berusaha di bidang yang memberikan pendapatan relatif lebih baik.

Jam Kerja Tenaga Kerja Informal

Menurut Mazumdar (1976), pada umumnya pekerja dalam sektor informal merupakan setengah pengangguran. Anggapan ini mungkin berlaku bagi pekerja informal dengan status pekerjaan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar dan pekerja bebas, baik di sektor pertanian maupun non pertanian. Tapi bagi tenaga kerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri dan berusaha dibantu anggota keluarga, pendapat itu tidak terbukti. Tenaga kerja informal dengan status pekerjaan yang disebutkan terakhir di Pelalawan sebagian besar (84,24 %) bekerja lebih dari 35 jam seminggu. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 : Jam Kerja dan Pendapatan Tenaga Kerja Informal

Kategori Pendapatan	Jam Kerja Tenaga Kerja Informal				Total	
	0-35 jam / minggu		Lebih 35 jam / minggu			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sama / besar dari UMP	12.413	28,21	79.703	34,61	92,116	33,70
Kecil dari UMP	30.672	71,19	150.586	65,39	181.258	66,30
Total	43.085	15,76	230.289	84,24	273.374	100

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan

Dari Tabel 5.3. dapat diketahui bahwa tenaga kerja informal yang bekerja di bawah 35 jam seminggu hanya 15,76 persen. Namun meskipun mayoritas pekerja mempunyai jam kerja yang cukup lama, hanya 33,70 persen dari mereka yang berpenghasilan sama atau lebih besar dari UMP. Ini memberi gambaran rendahnya produktifitas tenaga kerja informal. Tingkat kesejahteraan mereka tetap rendah, meskipun mereka sudah bekerja keras. Usaha yang dimulai dan dijalankan dengan modal seadanya, baik berupa modal material maupun modal keterampilan merupakan salah satu penyebabnya.

Informasi lain yang diperoleh dari tabel diatas adalah bahwa persentase tenaga kerja yang berpenghasilan sama atau lebih besar dari UMP lebih besar pada kelompok yang bekerja diatas 35 jam seminggu. Usaha informal pada umumnya merupakan usaha yang padat karya. Kalaupun digunakan mesin dan peralatan tertentu, biasanya merupakan peralatan dengan teknologi yang sederhana. Karena itu tenaga kerja merupakan faktor produksi terpenting. Semakin lama faktor produksi ini digunakan, semakin besar pendapatan yang dihasilkan.

Jumlah Modal Tenaga Kerja Informal

Menurut Ismawan (2003), kesulitan modal menduduki peringkat teratas dari berbagai kesulitan yang dihadapi oleh usaha mikro. Sebagian besar modal usaha mikro bersumber dari pemilik. Hasil yang sama didapatkan dari pengolahan data SUSI 2004, sebagaimana tergambar pada tabel 5.4.

Tabel 6 : Sumber Modal Usaha Tenaga Kerja Informal

Sumber Modal	Jumlah	Persen
Milik sendiri	207.789	76
Sebagian dari pihak lain	50.628	18,5
Dari pihak lain	14.957	5
Total	273.374	100

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan

Rendahnya aksesibilitas dari tenaga kerja informal terhadap sumber keuangan formal, menyebabkan kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya dari yang mereka miliki. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar modal dari usaha yang dijalankan tenaga kerja informal berjumlah kecil. Dari pengolahan data 2012 pada tabel 5.5. diketahui persentase terbesar modal usaha tenaga kerja informal berjumlah dibawah Rp 5.000.000,-

Tabel 7 : Jumlah Modal Usaha dan Pendapatan Tenaga Kerja Informal

Kategori Pendapatan	Jumlah Modal Tenaga Kerja Informal						Total	
	< 5 juta		5-10 juta		> 10 juta		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
Besar/sama UMP	48.020	35,08	15.986	31,36	28.110	32,81	92.116	33,70
Kecil dari UMP	88.867	64,92	34.986	68,64	57.405	67,13	181.258	60,30
Total	136.887	50,07	50.972	18,65	85.515	31,28	273.374	100

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan

Berbagai kajian tentang sektor informal atau pun pengembangan usaha mikro, selalu mengedepankan peranan modal sebagai kesulitan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha ini. Kesulitan modal mungkin merupakan kendala bagi pelaku usaha informal untuk memperbesar skala usaha. Namun dalam kaitan pendapatan yang dihasilkan dihubungkan dengan jumlah modal yang dimiliki pekerja atau pelaku usaha informal, hasil pengolahan data SUSI 2004 memberikan hasil yang berbeda.

Dari tabel 5.5 dapat kita ketahui bahwa persentase terbesar dari pendapatan sama atau lebih besar dari UMP justru terdapat pada kelompok yang mempunyai modal di bawah Rp 5 juta. Diduga ini disebabkan karena jumlah modal yang dibutuhkan pada berbagai jenis usaha bervariasi. Karena perbedaan modal relatif ini, untuk pengujian logistik digunakan jumlah modal rata-rata sebagai patokan untuk mengelompokkan modal dengan kategori modal berjumlah besar dan yang berjumlah kecil. Dari pengolahan data SUSI 2004, diperoleh modal rata-rata Rp 24 juta. Jumlah rata-rata yang cukup besar karena modal yang dimasukkan dalam analisis tidak hanya modal kerja, tetapi juga modal tetap yang didalamnya termasuk nilai mesin, tanah, kendaraan dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan program *SPSS versi 10.0 for windows*, maka pengujian model secara keseluruhan dengan menggunakan nilai $-2 \log$ likelihood dalam tabel *model summary* diperoleh angka 3849.938. Dengan angka yang demikian besar dapat disimpulkan bahwa model yang terdiri dari seluruh variabel signifikan secara statistik, karena nilai Chi Square (χ^2 , 0,05,7) hanya 12,59.

Sedangkan nilai koefisien dari masing-masing variabel bebas, Odd ratio dan confidence interval yang diperoleh dari hasil pengolahan dapat dilihat pada tabel 7:

Tabel 8 : Hasil Regresi Logistik Pendapatan Tenaga Kerja Informal dengan Variabel Bebas Lokasi Usaha, Lapangan Usaha, Jam Kerja Seminggu dan Interaksi antara Jam Kerja dan Jumlah Modal

Variabel	Koef.	Sig.	Odd Ratio	95% C.I Odd Ratio	Variabel Label
Lokasi Usaha	0,321	0,000	1,379	1,174 - 1,619	1 = Perkotaan
Lapangan Usaha 1	-1,251	0,000	0,286	0,241 - 0,340	1 = Perdagangan
Lapangan Usaha 2	0,309	0,008	1,362	1,083 - 1,714	1 = Jasa
Jam kerja seminggu	0,951	0,000	2,589	1,763 - 3,801	1 = > 35 jam/mg
Jumlah Modal	-0,327	0,093	0,721	0,492 - 1,056	1 = < 24 juta
Interaksi jam kerja & modal	0,158	0,453	1,171	0,776 - 1,768	1 = jam kerja > 35 jam/mgu & modal < 24 jt
Constant	-0,509	0,006	0,601		

Berdasarkan hasil pengujian yang diinformasikan tabel diatas, maka diperoleh persamaan logistik sebagai berikut :

$$\ln(p/1-p) = -0,509 + 0,321 X_1 - 1,251 X_2 + 0,309 X_3 + 0,951 X_4 - 0,327 X_5 + 0,158 X_6$$

Dimana :

- X₁ = Lokasi usaha pekerja informal di perkotaan
- X₂ = Pekerja informal dengan lapangan usaha perdagangan
- X₃ = Pekerja informal dengan lapangan usaha jasa
- X₄ = Pekerja informal dengan jam kerja lebih dari 35 jam seminggu
- X₅ = Pekerja informal dengan jumlah modal dibawah modal rata-rata
- X₆ = Pekerja informal dengan jam kerja lebih dari 35 jam seminggu, dan jumlah modal di bawah modal rata-rata.

Namun dari tabel hasil regresi logistik diatas variabel jumlah modal (X₅) tidak signifikan pada α 5%, tetapi signifikan pada α 10%. Sedangkan variabel interaksi antara jam kerja dan jumlah modal (X₆) tidak signifikan baik pada α 5%, maupun pada α 10%. Meskipun demikian variabel ini tetap dimasukkan ke dalam persamaan, karena pada dasarnya model logistik digunakan untuk membandingkan peluang suatu kelompok dibanding kelompok lain. Dengan mengeluarkan variabel yang tidak signifikan, kita akan kehilangan sekelompok informasi.

Nilai intersep (constant) dari persamaan logistik diatas adalah 0,509 dengan tanda negatif, berarti pada saat seluruh variabel yang terdapat dalam

persamaan berkode 0, yaitu tenaga kerja informal dengan lokasi usaha di pedesaan, lapangan usaha diluar perdagangan dan jasa, bekerja di bawah 35 jam seminggu, dan mempunyai modal diatas Rp 24 juta, maka probabilitas tenaga kerja informal memperoleh pendapatan sama atau lebih besar dari UMP adalah :

$$\begin{aligned} \ln(p/1-p) &= -0,509 \\ (p/1-p) &= e^{-0,509} \\ P &= e^{-0,509} / 1 + e^{-0,509} = 37,55 \%. \end{aligned}$$

Dengan demikian pada saat seluruh variabel independen yang terdapat dalam model berkode 1, maka peluang untuk mendapatkan penghasilan sama atau lebih besar dari UMP adalah 62,45 %.

1. Pengaruh Variabel Penjelas Terhadap Pendapatan

a. Variabel Lokasi Usaha

Tabel 5.6 menunjukkan koefisien untuk variabel lokasi usaha adalah 0,321 dan bertanda positif. Hal ini berarti tenaga kerja informal yang lokasi usahanya berada di perkotaan mempunyai peluang lebih tinggi untuk memperoleh pendapatan sama atau lebih besar dari UMP, dibanding kelompok pembandingnya, yaitu tenaga kerja informal yang usahanya berlokasi di pedesaan. Dengan nilai odd ratio (Exp. B) 1,379 berarti peluang tenaga kerja informal yang lokasi usahanya di perkotaan untuk mendapatkan pendapatan sama atau lebih besar dari UMP 1,379 kali dari kelompok pekerja informal yang usahanya berlokasi di pedesaan. Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis deskriptif sebelumnya, pangsa pasar yang relatif lebih luas di perkotaan mempengaruhi omset dan laba bersih dari usaha informal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hidayat (2006) tentang kemiskinan di Pelalawan, yang menemukan bahwa rumah tangga di pedesaan mempunyai peluang miskin lebih tinggi dari rumah tangga di perkotaan. Pendapatan yang lebih rendah merupakan sebab utama tingginya kemiskinan di pedesaan.

c. Variabel Lapangan Usaha Perdagangan

Dari hasil uji logistik didapatkan koefisien untuk variabel lapangan usaha perdagangan sebesar -1,251. Dengan koefisien bertanda negatif berarti tenaga kerja informal pada lapangan usaha perdagangan mempunyai peluang lebih rendah untuk memperoleh penghasilan sama atau lebih besar dari UMP dibanding kelompok yang bergerak diluar perdagangan. Dengan nilai odd ratio sebesar 0,286, berarti peluang tenaga kerja informal di sektor perdagangan untuk memperoleh pendapatan sama atau lebih besar dari UMP 0,286 kali kelompok pembandingnya yang bergerak diluar perdagangan.

Rendahnya tingkat pendapatan tenaga kerja informal disektor perdagangan disebabkan karena pelaku informal yang bergerak di sektor ini berjumlah besar, mencapai dua pertiga dari tenaga kerja informal yang dianalisis dalam penelitian ini. Jumlah yang besar, dengan pasar yang terbatas karena sebagian besar lokasi usaha di pedesaan sebagaimana digambarkan dalam tabel 5.1 membuat omset per harinya kecil, sehingga keuntungan yang diperoleh juga rendah. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya pendapatan karena daya beli masyarakat masih rendah. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, yang terutama terkonsentrasi di pedesaan

membuat sebagian masyarakat membatasi pengeluaran untuk kebutuhan pokok saja.

d. Variabel Lapangan Usaha Jasa

Untuk pengaruh lapangan usaha jasa, dari hasil analisis data pada tabel sebelumnya, menunjukkan angka koefisien 0,309 dan bertanda positif, yang menunjukkan peluang yang lebih besar dari tenaga kerja informal pada lapangan usaha jasa untuk mendapatkan pendapatan sama atau lebih besar dari UMP dibanding kelompok pembandingnya. Dengan nilai Odd rasio sebesar 1,362, berarti probabilitas pekerja informal pada lapangan jasa untuk mendapatkan pendapatan sama atau besar dari UMP 1,362 kali dibanding tenaga kerja yang bergerak diluar sektor jasa.

e. Variabel Jumlah Jam Kerja

Dengan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, dengan uji logistik diperoleh koefisien variabel jam kerja seminggu sebesar 0,951. Tanda yang positif menunjukkan tenaga kerja informal yang bekerja diatas 35 jam seminggu mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh pendapatan sama atau lebih besar dari UMP dibanding kelompok tenaga kerja pembandingnya. Nilai odd ratio sebesar 2,589 menunjukkan peluang pendapatan tenaga kerja informal sama atau lebih besar dari UMP bagi yang bekerja di atas 35 jam seminggu 2,589 kali dibanding mereka yang bekerja di bawah 35 jam seminggu.

f. Variabel Jumlah Modal

Meskipun pada analisis dekriptif ditemukan persentase tenaga kerja yang mempunyai pendapatan sama atau lebih besar dari UMP lebih tinggi pada jumlah modal yang lebih kecil (di bawah Rp 5 juta), namun pangujian logistik dengan menggunakan jumlah modal rata-rata (Rp 24 juta) sebagai dasar pengkategorian modal, ditemukan hubungan positif antara jumlah modal dan pendapatan yang diperoleh. Dari tabel uji logistik didapatkan koefisien variabel -0,327. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan kelompok pembanding, yaitu tenaga kerja yang mempunyai modal sejumlah atau lebih besar dari modal rata-rata (24 juta ke atas) mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan sama atau lebih besar dari UMP. Dengan nilai odd ratio sebesar 0,721, dapat disimpulkan peluang tenaga kerja informal yang mempunyai modal dibawah Rp 24 juta 0,721 kali dibanding tenaga kerja informal yang modalnya berjumlah Rp 24 juta ke atas.

g. Variabel Interaksi antara Jumlah Jam Kerja dan Jumlah Modal

Untuk variabel interaksi antara jumlah jam kerja dan jumlah modal, dari tabel hasil uji logistik kita ketahui bahwa variabel ini tidak signifikan pada $\alpha 5\%$ maupun $\alpha 10\%$. Variabel ini mencoba membandingkan probabilita tenaga kerja yang mempunyai jam kerja besar (lebih dari 35 jam seminggu) dan mempunyai modal kecil (di bawah modal rata-rata), dengan tenaga kerja yang mempunyai jam kerja kecil (di bawah 35 jam seminggu) dan modal besar (besar sama modal rata-rata). Tidak signifikannya hubungan ini menunjukkan sulit dibuat paradoks antara jam kerja dan modal pada usaha informal karena faktor produksi tenaga kerja dan modal sama-sama dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan suatu usaha informal.

Meskipun demikian dari hasil uji, dimana diperoleh koefisien positif sebesar 0,158 dan odd rasio sebesar 1,171, diperoleh informasi bahwa tenaga kerja yang mempunyai jam kerja besar dan modal kecil mempunyai peluang sedikit lebih besar (1,171 kali) untuk memperoleh pendapatan sama atau lebih besar dari UMP dibandingkan tenaga kerja dengan jam kerja kecil dan jumlah modal relatif besar. Setidaknya hasil uji ini memperkuat hasil uji sebelumnya bahwa pengaruh jam kerja lebih besar dibandingkan pengaruh modal terhadap pendapatan tenaga kerja informal.

3. Implikasi Kebijakan

Dari analisa ditemukan bahwa jam kerja mempunyai pengaruh paling besar terhadap pendapatan tenaga kerja informal. Usaha informal yang merupakan unit usaha kecil, padat tenaga kerja dan pada umumnya menggunakan teknologi sederhana merupakan hal yang melatarbelakangi fenomena ini. Dari analisa deskriptif diperoleh informasi bahwa sebagian besar tenaga kerja informal bekerja di atas 35 jam seminggu. Namun ironisnya sebagian besar mereka justru berpendapatan di bawah Upah Minimum Propinsi. Hasil temuan ini mengindikasikan rendahnya produktifitas tenaga kerja informal. Poin penting lain yang ditemukan adalah adanya kecenderungan lapangan usaha yang membutuhkan keterampilan tertentu seperti sektor jasa, transportasi dan konstruksi untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik daripada sektor yang tidak membutuhkan keahlian seperti perdagangan.

Walaupun berdasarkan analisa sebelumnya pengaruh jumlah modal tidak sebesar pengaruh jam kerja terhadap pendapatan, namun faktor modal merupakan poin penting untuk pengembangan usaha informal. Dengan skala usaha yang lebih besar, diharapkan keuntungan yang diperoleh juga meningkat.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kebijakan untuk peningkatan produktifitas tenaga kerja dan kebijakan untuk mempermudah akses pekerja informal terhadap permodalan.

1. Kebijakan Untuk Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Informal

Tenaga kerja informal pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Ini merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya produktifitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, program wajib belajar dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatnya pendidikan. Pemerintah harus proaktif mengupayakan agar program wajib belajar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Wajib belajar harus mulai mengarah pada keharusan pendidikan pada tingkat SMA sederajat. Disamping itu, pendidikan kewirausahaan harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan menengah.

Dalam jangka pendek dan menengah penyelenggaraan pelatihan-pelatihan keterampilan harus digalakkan. Dari hasil analisis data diperoleh informasi bahwa lapangan usaha yang relatif membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu seperti jasa, konstruksi dan transportasi memberikan pendapatan yang lebih baik. Dengan pelatihan-pelatihan keterampilan seperti montir, menjahit, pertukangan

dan berbagai keterampilan lain, tenaga kerja informal yang berusaha pada jenis pekerjaan yang kurang produktif atau memberikan pendapatan kecil diharapkan mempunyai modal keterampilan untuk ‘beralih profesi’ pada jenis pekerjaan yang lebih baik. Bimbingan dan pendampingan juga diperlukan kepada mereka yang sebenarnya mempunyai potensi untuk berkembang, tapi karena kurang informasi dan kurangnya kemampuan manajerial mengalami kesulitan mengembangkan usaha. Metode pemagangan bagi sektor informal seperti yang dikembangkan di luar negeri, dapat menjadi alternatif bagi peningkatan produktifitas pekerja informal. Intinya pemberian keterampilan dan pengalaman bagi mereka akan sangat membantu mengatasi berbagai kendala yang mereka hadapi.

2. Kebijakan Untuk Meningkatkan Akses Terhadap Permodalan

Kesulitan utama yang dihadapi oleh usaha informal untuk mengembangkan usaha adalah kesulitan untuk mengakses modal dari Lembaga Perbankan. Sebagai kelompok lapisan masyarakat bawah dengan kemampuan sangat terbatas, biasanya pengusaha informal terbentur dengan berbagai persyaratan seperti agunan atau jaminan. Karena itu sebagian besar pengusaha informal mengandalkan modal apa adanya dari yang mereka miliki.

Untuk mengatasi masalah tersebut dan karena modal merupakan faktor yang sangat mereka butuhkan, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro memegang peranan penting. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan kelembagaan yang memfokuskan diri melayani para pengusaha mikro. LKM sendiri sudah lama ada di masyarakat namun jumlahnya terlalu kecil bila dibandingkan kebutuhan para pengusaha mikro atau pengusaha informal.

Melihat peranan strategis dari Lembaga Keuangan Mikro, pemerintah harus berupaya mengembangkan LKM yang telah ada dan memfasilitasi pembentukan LKM-LKM baru. Sehubungan dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah :

1. Pengakuan dan Perlindungan
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas : Praktek dan Pengelolaan
3. Hal ini terkait dengan penguatan dan peningkatan kapasitas Lembaga Keuangan Mikro melalui penyebaran informasi melalui pelatihan-pelatihan untuk para pengelolanya, pengembangan teknologi, manajemen, pemasaran, dan lain-lain.
4. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas : Sumberdaya Finansial. Hal ini dikaitkan dengan ketersediaan dana sekunder (dana yang tidak berasal dari LKM yang bersangkutan).

Namun kenyataannya LKM yang berbentuk bank seperti BPR, mempunyai bunga yang tinggi, sehingga membebani para pelaku informal. Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif lain, misalnya dengan sistim syariah. Dengan bunga yang tidak terlalu tinggi, diharapkan semakin banyak pelaku usaha informal yang memanfaatkan lembaga keuangan untuk mengembangkan usahanya, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Uraian di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja informal mempunyai pendapatan di bawah Upah Minimum Propinsi. Ini berarti kesejahteraan mayoritas tenaga kerja informal masih rendah dan rata-rata berada dibawah kesejahteraan tenaga kerja formal. Dari analisis logistik diketahui bahwa perbedaan lokasi usaha, lapangan usaha, jumlah jam kerja dan jumlah modal mempengaruhi probabilitas tenaga kerja informal untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Secara lebih rinci pengaruh tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh variabel lokasi usaha terhadap pendapatan tenaga kerja informal, ditemukan bahwa usaha informal yang berlokasi di perkotaan, mempunyai probabilitas lebih besar untuk mendapatkan pendapatan sama atau lebih besar dari UMP dibandingkan tenaga kerja informal yang berlokasi di pedesaan. Sehubungan dengan itu program-program peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal harus menjangkau mereka yang berada di pedesaan.
2. Dari analisis deskriptif terhadap lapangan usaha ditemukan bahwa lapangan usaha yang memerlukan keterampilan tertentu seperti jasa, konstruksi dan transportasi memberikan pendapatan yang lebih baik daripada lapangan usaha perdagangan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Hasil analisis deskriptif ini juga dibuktikan dengan pengujian logistik.
3. Variabel jam kerja berdasarkan uji logistik, memberikan pengaruh paling besar terhadap pendapatan tenaga kerja informal. Dari analisis deskriptif ditemukan sebagian besar tenaga kerja bekerja dalam jam kerja besar, namun disisi lain sebagian besar pendapatan mereka berada di bawah UMP. Kenyataan itu mengindikasikan rendahnya produktifitas tenaga kerja informal. Berdasarkan temuan ini dan temuan poin 3, maka pelatihan-pelatihan keterampilan merupakan program yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal.
4. Pengujian logistik juga membuktikan bahwa jumlah modal mempunyai hubungan positif dengan pendapatan tenaga kerja informal. Sehubungan dengan itu program-program untuk peningkatan akses pekerja informal terhadap permodalan harus terus dijalankan.

Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis ini, maka terdapat beberapa saran dalam usaha meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja informal di Pelalawan, yaitu :

1. Dengan melihat jumlah tenaga kerja informal di Pelalawan yang melebihi dua pertiga dari keseluruhan pekerja, maka pemerintah propinsi Pelalawan harus memberikan perhatian serius, terlebih dengan kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan mereka masih rendah

2. Program-program peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal harus menjangkau sampai ke pedesaan, supaya pemerataan pendapatan secara bertahap dapat diwujudkan.
3. Program-program pelatihan harus diprioritaskan pada keterampilan-keterampilan yang mudah dikuasai dan mempunyai prospek yang baik untuk digunakan dalam pengembangan usaha.
4. Sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan dana bagi pengusaha informal, pemerintah harus mengembangkan dan membina Lembaga Keuangan Mikro.
5. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan upaya penguatan usaha mikro atau usaha informal dalam permodalan, maka harus diperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Sosialisasi harus cukup memadai, termasuk waktu dan sasaran sosialisasi
 - b. Program harus dapat menjamin keberlanjutan upaya penguatan sampai pada tahap dimana usaha mikro mampu berdiri sendiri
 - c. Penanganan pasca program harus jelas dan transparan

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Drs. Kennedy, MM. Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
2. Bapak Dr. H. M. Rasuli, M.Si, Ak, Selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
3. Ibu Hj. Toti Indrawati, SE.M.Si, Selaku Ketua Bidang Studi Ilmu Ekonomi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
4. Bapak Drs. H. Syafril Basri, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Hendro Ekwarso, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan demi selesainya skripsi ini..
5. Bapak Prof. Dr. H. B. Isyandi, SE, MSi selaku Penasehat Akademis
6. Pimpinan dan staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan serta responden, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan yang berada dilingkungan Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
8. Khususnya buat keluargaku tercinta yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan dan memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapatnya kekuarangan baik materi yang tercakup didalamnya maupun tata cara

penyajiannya. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata, namun manusia hanya berusaha untuk mendekati kesempurnaan, masukan dari pembaca sangat berarti bagi penulis dalam upaya untuk mendekati kesempurnaan. Sekali lagi terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Dessy (2003), *Perubahan Struktur Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Struktur Ketenagakerjaan*, Jurnal Agribisnis dan Industri Pertanian Vol. 2 No,1 Maret 2003
- Akhirmen (1997), *Faktor-faktor Penentu Pengembangan Pedagang Kecil Sektor Informal (Studi kasus di kota Padang)*. Tesis Pascasarjana Universitas Andalas
- Almasdi Syahza, 2009. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Bachtiar, Nasri (2004), *Fenomena Upah Rendah dan Daya Saing Produk*, Lembaga Penelitian Ekonomi Universitas Andalas
- Budiantoro, Setyo (2003), *RUU Lembaga Keuangan Mikro : Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan dari Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th.II - No.8- November 2003
- Anthony Mayes. 2006. *Profil Usaha Kecil Menengah Kabupaten / Kota Di Provinsi Riau*, Jurnal ekonomi Vol 2. No.3.hal 226-224
- Anthony Mayes dan Ani Widayatsari, 2009. *Ekonomi Moneter II*. Pekanbaru: Cendekia Insani.
- Bachtiar, Nasri (2004), *Fenomena Upah Rendah dan Daya Saing Produk*, Lembaga Penelitian Ekonomi Universitas Andalas
- Budiantoro, Setyo (2003), *RUU Lembaga Keuangan Mikro : Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan dari Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th.II - No.8- November 2003
- Anthony Mayes. 2006. *Profil Usaha Kecil Menengah Kabupaten / Kota Di Provinsi Riau*, Jurnal ekonomi Vol 2. No.3.hal 226-224
- Anthony Mayes dan Ani Widayatsari, 2009. *Ekonomi Moneter II*. Pekanbaru: Cendekia Insani.
- Badan Pusat Statistik. 2003. *Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tambah dan Ekspor Usaha Kecil Menengah serta Peranannya Terhadap Tenaga Kerja Nasional Dan Produk Domestik Bruto Menurut Harga Konstan dan Harga Berlaku*. Laporan Akhir proyek Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan, Kementrian KUKM, RI.
- Boediono. 2001. *Ekonomi Moneter Cetakan VII*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

- Dornbush.R, Fisher.S, Startz.R, 2004, *Makro Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia*, PT. Media Global Idukasi. Jakarta: PT. Media Ilmu Global Edukasi.
- Gujarati, Damondar N. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama
- Imam Gozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,.
- Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keenam*. Yogyakarta: BPFEE.
- Iswardono. 2000. *Suku Bunga Diturunkan Investasi akan Meningkat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.14. No.2 hal 34-24.
- Lincoln Arsyad. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*. Yogyakarta:CV.Andi Offset
- Mangani, Ktut Silvanita. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Mankiw N.Gregore. 2005. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*, Jakarta: Erlangga
- Michael P. Todaro, 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*, Jakarta: PT.Glora Aksara Pratama.
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nicholson.W. 2003. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya, Edisi Kedelapan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter Buku II*. Yogyakarta: BPFEE.
- Sadono Sukirno. 2005. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sahibul, 2000, Pengantar Mikro Ekonomi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Sih Darmi Astuti dan J.Widiatmoko. 2003. *Profil Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Jurnal Fokus Ekonomi, Vol 2, No.3, Desember 2003.
- Soediyono. 2000. *Ekonomi Makro : Analisis IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregat*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudjana. 2002 *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Peneliti*. Bandung: Transito.
- Sugiarto. 2005. *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Konprehensif*, PT Gramedia UTAMA, Jakarta.
- Tulus T.H.Tambunan. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umar,Husein.2000.*Metode Penelitian Untuk Skripsi*.PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.